

Demokrasi, Oligarki, & Perempuan

satunama



UNDEF The United Nations Democracy Fund

SATUNAMA Menanam Benih Keadilan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Lokakarya Nasional Demokrasi, Oligarki & Perempuan

Peran CSO, Pemerintah Legislatif & Media dalam Memperkuat Perempuan dalam Demokrasi Lokal

Selasa, 12 Mei 2015
Gedung FISIP 2 Lt 4 Ruang Auditorium 4 FISIP Atmajaya
Jl. Babarsari No. 6 Depok Sleman DIY

YPS
Lembaga Gemawan
SKP-KAME

Lokakarya Nasional

DEMOKRASI, OLIGARKI, & PEREMPUAN

Peran OMS, Pemerintah-Legislatif, & Media dalam Memperkuat Perempuan Di Demokrasi Lokal

Sejak kejatuhan rezim totaliter Soeharto, upaya memperkuat praktik demokrasi yang hakiki tak pernah berhenti. Di tingkat nasional hingga lokal ragam *exercise* praksis demokrasi terus diolah demi menemukan wajah demokrasi yang memproduksi dan mewartakan keadilan bagi publik. Harapan angin demokratisasi mengubah wajah keadaban publik mengalami jalan terjal. Potret harapan itu terus berkelindan dengan pembusukan peran lembaga-lembaga demokrasi.

Tantangan riil dan jalan terjal menghadirkan wajah demokrasi dengan rakyat sebagai aktor utama, dengan aneka intrik, direbut kembali oleh mereka yang memiliki sumberdaya dan terbiasa memakai kendaraan demokrasi dengan alasan-alasan yang terlihat kudus namun kenyataannya kudis.

Studi SATUNAMA melalui program “Hak Asasi Manusia dan Aliansi Penguatan Para Aktor Demokrasi untuk Memperkuat Demokrasi Di Indonesia” bekerja sama dengan UNDEF dan 3 lembaga mitra yaitu (1) Yayasan Paramadina Semesta (YPS) di Kabupaten Nagan Raya (Aceh Barat Selatan), (2) Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAME) / Lembaga Advokasi Peduli Perempuan (eL_AdPPer), Kabupaten Merauke (Papua Selatan), dan (3) Lembaga Gemawan, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat menemukan situasi-situasi awal yang berbeda punggung dengan angin harapan demokrasi.

Demokrasi lokal mengalami pembajakan serius dan pembodohan akut. Di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua misalnya, peran perempuan dalam urusan publik sangat terbatas. Ketidakpuasan warga lebih banyak diaktualisasikan melalui “oposisi bisik-bisik”. Diskusi yang diwarnai ketakutan tentu menghambat partisipasi warga. Warna yang kurang lebih sama juga terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam. Minimnya peran-peran publik perempuan makin diperlemah dengan kuatnya penguasa lokal yang lahir dari tradisi kepemimpinan

kaum ningrat-agama. Kondisi di Kabupaten Kubu Raya, kabupaten hasil pemekaran di Provinsi [Kalimantan Barat](#), tidak jauh berbeda; praktik-praktik aktor demokrasi dalam membajak harapan publik marak. Peran perempuan yang lemah dalam urusan-urusan publik berkorelasi positif dengan pelibatan mereka di aras pemerintah lokal. Semua fakta praksis demokrasi lokal tersebut, tentu membutuhkan terobosan-terobosan cerdas untuk meretas benang kusut aksi pembajakan para aktor manipulatif demokrasi.

Dari proses yang berjalan selama 2 tahun pelaksanaan program, terobosan-terobosan praksis demokrasi lokal telah memberikan titik-titik harapan baru. Partisipasi publik dan kontrol terhadap praktik jalannya pemerintahan lokal berjalan dengan daya yang cukup. Aktor masyarakat sipil dengan perempuan sebagai roh pendobrak telah menghasilkan paparan-paparan baru, seperti adanya pola relasi baru antara masyarakat sipil dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), legislatif dan [media massa](#). Relasi-relasi baru ini tentu memengaruhi cakar dan peluru oligarki. Pemilik-pemilik kuasa lokal mulai memberikan ruang atas partisipasi publik. Munculnya prakarsa reformasi kebijakan publik di 3 area proyek dengan perempuan sebagai batu penjurus adalah negasi bahwa terminal pembenahan praksis demokrasi terus berjalan. Media massa sebagai aktor dan pilar penguatan wajah demokrasi juga hadir dalam dinamika pelaksanaan proyek. Ada beberapa hasil penting:

- Di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, misalnya: Isu strategis proteksi mama-mama pedagang asli Papua menjadi pokok rancangan kebijakan atau usulan kebijakan baru di Kabupaten Merauke.
- Di Kabupaten Nagan Raya, Nanggroe Aceh Darussalam misalnya: Isu strategis perlindungan kesehatan ibu dan anak menjadi pokok rancangan Qanun Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Nagan Raya, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
- Di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat misalnya: Isu strategis Representasi Perempuan di Pemerintahan [desa](#) menjadi pokok usulan kebijakan atau Perda Kabupaten Kubu Raya tentang Representasi Perempuan di BPD.

Bertitik tolak rangkaian kerja di 3 area proyek yang berlangsung selama 2 tahun, UNDEF-SATUNAMA dan 3 mitra (YPS-SKP-GEMAWAN) menyelenggarakan Lokakarya Nasional bertajuk “**Demokrasi, Oligarki, dan Perempuan: Peran OMS, Pemerintah-Legislatif, & Media dalam Memperkuat Perempuan Di Demokrasi Lokal**” untuk mendiskusikan, menghimpun masukan dan rekomendasi dari aneka pemangku kepentingan ihwal perkembangan demokrasi lokal, serta menghimpun tanggapan para politisi dan pemerintah lokal terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan manfaat program

Lokakarya Nasional ini akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2015

Waktu : 08.00-16.00 WIB

Tempat : Gedung FISIP 2 Lantai 4, Ruang Auditorium 4 FISIP

Jl. Babarsari No. 6 Kecamatan Depok, Kabupaten [Sleman](#), Daerah Istimewa [Yogyakarta](#)

Narasumber:

- Eva Kusuma Sundari, Staf Khusus Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Republik Indonesia.
- Lukas S. Ispandriarno, Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu [Politik](#) Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- William E. Aipipidely, Koordinator Nasional Program SATUNAMA-UNDEF

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi

William E. Aipipidely (082226742953, surel willy@satunama.org).

Copyright © 2015 SATUNAMA | A.K. Perdana | [MH Themes](#)

a

